



PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA



Laporan Kegeiatan Tahun 2020

JALAN SILIWANGI NO. 18
KOTA TASIKMALAYA
Telp. (0265) 323677-330910
Fax. (0265) 323677-2354673
Email: info@pn-tasikmalaya.go.id
Website: www.pn-tasikmalaya.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaannirrohiim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun rangkaian kinerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam kurun waktu 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dalam **LAPORAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA TAHUN 2020** yang out line nya telah ditentukan Ketua pengadilan Tinggi Bandung.

Laporan Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai dokumentasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri dalam melayani pihak pencari keadilan. Di samping itu laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tugas pokok tersebut guna peningkatan di tahun yang akan datang.

Dalam laporan tahun 2020 ini berisi tentang keadaan kantor terkini, kegiatan pelaksanaan tugas di kepaniteraan Pidana, kepaniteraan perdata termasuk pelaporan keadaan perkara yang masuk dan yang telah diputus serta upaya hukum, pelaksanaan tugas di kepaniteraan hukum, bagian keuangan, bagian kepegawaian dan bagian umum termasuk pelaksanaan inventaris BMN serta yang sangat signifikan adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik.

Dalam Laporan ini kami angkat kekurangan, hambatan dan Rekomendasi dalam pelaksanaan kerja, namun demikian kekurangan dan hambatan tidak mengurangi atau menghambat target dan capaian kinerja yang direncanakan untuk tahun 2020, Rekomendasi diperlukan dalam rangka mencapai hasil kerja maksimal di tahun mendatang dengan demikian melalui laporan tahun 2020 ini diharapkan pelaksanaan tugas dan kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang sudah menjadi acuan untuk kinerja di tahun mendatang guna memaksimalkan capaian kinerja yang mendukung Visi Misi Mahkamah Agung dan di implementasikan pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama dari para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural yang tergabung dalam Tim Penyusun Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020 ini.

Selanjutnya kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan harapan Laporan Kegiatan Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini dapat memenuhi ketentuan yang diharapkan.

Terima kasih.

Tasikmalaya, 8 Januari 2021
KETUA
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

ttd

H. WINARNO,SH.,MH.
Nip. 1968100719921210

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	5
C. Renstra (Rencana Strategi)	6
BAB II Keadaan Perkara	7
A. Keadaan Perkara	7
1. Keadaan Perkara Perdata	7
2. Keadaan Perkara Pidana	7
B. Penyelesaian Perkara	8
1. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	8
2. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	9
3. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	9
4. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi	10
C. Pelayanan Publik Yang Prima	10
1. Kreditasi Penjaminan Mutu	10
2. Posbakum	11
3. Perkara Prodeo	11
BAB III Sumber Daya Manusia (SDM)	12
A. Sumber Daya Manusia (SDM)	12
1. Mutasi	17
2. Promosi	17
3. Pensiun	18
4. Diklat	18
5. Kebutuhan Pegawai	18
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi	19
A. Pengelolaan Keuangan	19
1. Dipa 005.01 (Badan Urusan Administrasi)	19
2. Dipa 005.03 (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum)	21
B. Pengelolaan Sarana Prasarana	21
C. Dukungan Teknologi Informasi	26
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	29
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	29
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31
C. Inovasi Pelayanan Publik	33
BAB VI Pengawasan	34
BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Luas Wilayah Administratif Kecamatan Kota Tasikmalaya	3
Tabel 1.2 : Luas Wilayah Administratif Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya	4
Tabel 2.1 : Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	7
Tabel 2.2 : Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	8
Tabel 2.3 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	8
Tabel 2.4 : Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Perkara Perdata	9
Tabel 2.5 : Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Perkara Pidana	9
Tabel 2.6 : Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi	9
Tabel 2.7 : Keterangan Perkara Yang berhasil Mediasi	10
Tabel 2.8 : Keterangan Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi	10
Tabel 2.9 : Keterangan Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	10
Tabel 3.1 : Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial	14
Tabel 3.2 : SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL	15
Tabel 3.3 : Sumber Daya Manusia Pegawai Kontrak (PPNPN PN Tasikmalaya)	16
Tabel 3.4 : Mutasi Masuk Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	17
Tabel 3.5 : Mutasi Keluar Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	17
Tabel 3.6 : Promosi Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	17
Tabel 3.7 : Promosi Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	17
Tabel 3.8 : Pensiun Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	18
Tabel 3.9 : Rekap Data Pegawai Mengikuti Diklat/Pelatihan Pengadilan Negeri Tasikmalaya	18
Tabel 3.10 : Kebutuhan Pegawai Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	19
Tabel 4.1 : Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja	20
Tabel 4.2 : Rincian DIPA Berdasarkan Program/Kegiatan:	21
Tabel 4.3 : Revisi Anggaran Dipa 01	21
Tabel 4.4 : perbandingan realisasi anggaran TA 2018 dan TA 2020	21
Tabel 4.5 : Revisi Anggaran Dipa 03	22
Tabel 4.6 : Perbandingan realisasi anggaran TA 2018 dan TA 2020	22
Tabel 4.7 : Rumah Dinas	23
Tabel 4.8 : Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tasikmalaya	24
Tabel 4.9 : Sarana Dan Prasarana Peralatan dan Mesin	24
Tabel 6.1 : Susunan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tasikmalaya	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Peta Kota Tasikmalaya	3
Gambar 1.2 : Peta Kabupaten Tasikmalaya	5
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020	13
Gambar 4.1 : Media Informasi	28
Gambar 4.2 : Aplikasi SIPP	28
Gambar 4.3 : Aplikasi MIS	29
Gambar 4.4 : Peta e-Court PN Tasikmalaya	29
Gambar 4.5 : Eraterang Mahkamah Agung	29
Gambar 4.6 : Survey IKM dan IPK	30
Gambar 4.7 : Aplikasi PTSP	30
Gambar 4.8 : Survey Pelayanan PTSP	30
Gambar 5.1 : Sertifikat APM PN Tasikmalaya	33
Gambar 5.2 : PTSP, Pojok e-COUTR dan Meja Inzage PN Tasikmalaya	34
Gambar 5.3 : Meja PTSP dan Pelalatan Pendudkung Lainnya	35

BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

1. Latar Belakang

Bahwa tugas pokok Pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan. Atau dengan perkataan lain tugas pokok Pengadilan adalah mengadili dengan berpedoman kepada “Mengadili Menurut Hukum dan Keadilan”. Di Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1698 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya manusia dan sumber dana keuangan serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Dalam rangka mengemban tugas pokok ini, diiringi dengan banyaknya Sorotan para *Justiabelen* (Pencari Keadilan), Mahkamah Agung dan Jajarannya dari tahun ketahun seiring dengan sistem satu atap telah membenahi diri guna memenuhi standar pelayanan publik dibidang peradilan.

Perlu dipahami bahwa berhasil tidaknya peradilan tidak hanya ditentukan oleh internal peradilan saja, akan tetapi dalam menjalankan fungsinya sangat berkaitan dengan kinerja badan penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengacara. Oleh karena itu keluhan para pencari keadilan sebaiknya tidak di tumpukan pada badan pengadilan itu sendiri.

Menyikapi posisi dan tugas demikian itu, peradilan telah berkomitmen untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pencari keadilan dengan berpedoman kepada “Mengadili menurut hukum dan keadilan”. Hal itu tercapai tidak terlepas pula dari dukungan semua pihak, adanya tunjangan sarana dan prasarana dalam meberikan pelayana prima serta terselenggaranya keterbukaan informasi yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu laporan Kegiatan Tahun 2020 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan tak terpisahkan dari seluruh proses kegiatan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam satu tahun berjalan, bahkan laporan Kegiatan tahun 2020 merupakan potret hasil kerja yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun kebelakang yang juga dapat dijadikan barometer dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Lebih jauh laporan

Kegiatan tahun 2020 secara eksternal sebagai wujud transparansi kinerja Peradilan sebagaimana yang diharapkan dalam konteks Reformasi Peradilan yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1999 silam.

Laporan Kegiatan tahun 2020 Pengadilan Negeri Tasikmalaya kami susun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020 dan Surat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/5965/OT.01.1/12/2020 tentang Permintaan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dengan diteruskan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya W11.U9/59/KP.11.01/XII/2020 tentang tim penyusun laporan Kegiatan tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Secara khusus Laporan kegiatan Pengadilan Negeri Tasikmalaya baik yang menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan secara kontinu telah kami laporkan setiap bulan kepada Pengadilan Tinggi Bandung dan Dirjen Badan Peradilan Umum, namun berdasarkan pertimbangan hal hal di atas laporan Kegiatan tahun 2020 merupakan hal penting sebagai gambaran secara komprehensif kondisi maupun proses kegiatan Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama Tahun 2020, hal tersebut sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.143 Tahun 2007 tentang Memberlakukan Buku I Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) hal 13-17.

2. Kedudukan dan Letak Geografis

Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkedudukan di kota Tasikmalaya, merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bandung dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkedudukan di kota Tasikmalaya ;

Alamat : JL. Siliwangi No.18 Kota Tasikmalaya 46126.

Telp. : (0265) 339010-323677,

Fax. : (0265) 323677-2354673,

Email : ptip.pntasikmalaya@gmail.com,

Website : www.pn-tasikmalaya.go.id :

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya terbagi atas dua wilayah hukum yaitu Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya dengan keterangan sebagai berikut;

a. Kota Tasikmalaya

1) Letak Geografis

Kota Tasikmalaya secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu berada pada 108° 08' 38" – 108° 24' 02" Bujur Timur dan 7° 10' – 7° 26' 32" Lintang Selatan di bagian Tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Barat, Bandung + 105, wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis (dengan batas sungai Citanduy)
- Sebelah Barat : Kab. Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis
- Sebelah Selatan : Kab. Tasikmalaya (batas sungai Ciwulan)

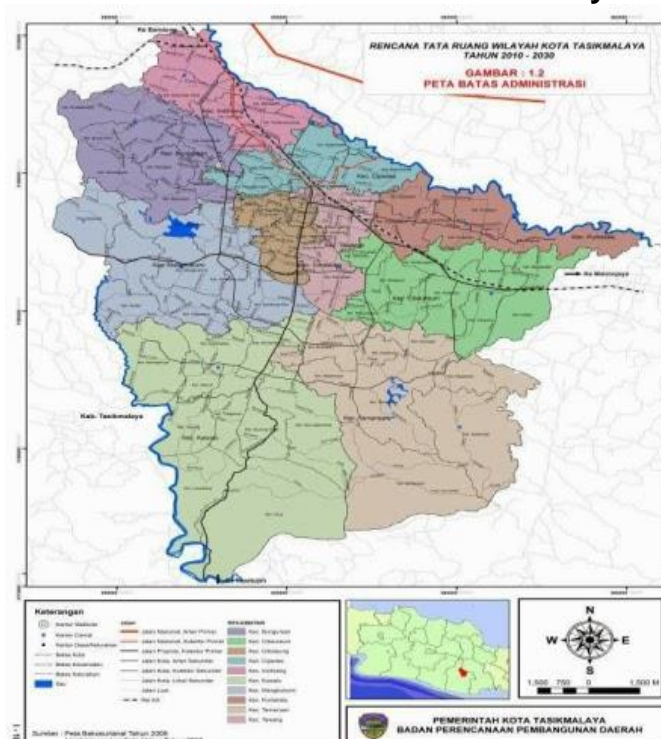
2) Luas Wilayah

Kota Tasikmalaya memiliki wilayah seluas 183,85 km² yang meliputi wilayah 10 Kecamatan yaitu : Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, Indihiang, Cibeureum, Purbaratu dan Bungursari. Data ke-10 Kecamatan yang mencakup 69 Kelurahan sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 : LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF KECAMATAN DAN JUMLAH WILAYAH ADMINISTRATIF KELURAHAN

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kelurahan
1	Cihideung	5,49	6
2	Cipedes	8,97	4
3	Tawang	7,08	5
4	Indihiang	11,04	6
5	Kawalu	42,78	10
6	Cibeureum	19,04	9
7	Tamansari	35,99	8
8	Mangkubumi	24,53	8
9	Purbaratu	12,02	6
10	Bungursari	16,91	7
Jumlah :		183,85	69

Gambar 1.1 : Peta Kota Tasikmalaya



b. Kabupaten Tasikmalaya

1) Letak Geografis

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak di antara 7°02'29" dan 7°02'29" Lintang Selatan serta 107°54'10" dan 108°25'42" Bujur Timur :

- Sebelah Utara : Kab. Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Majalengka
- Sebelah Barat : Kab. Garut
- Sebelah Timur : Kab. Ciamis
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia

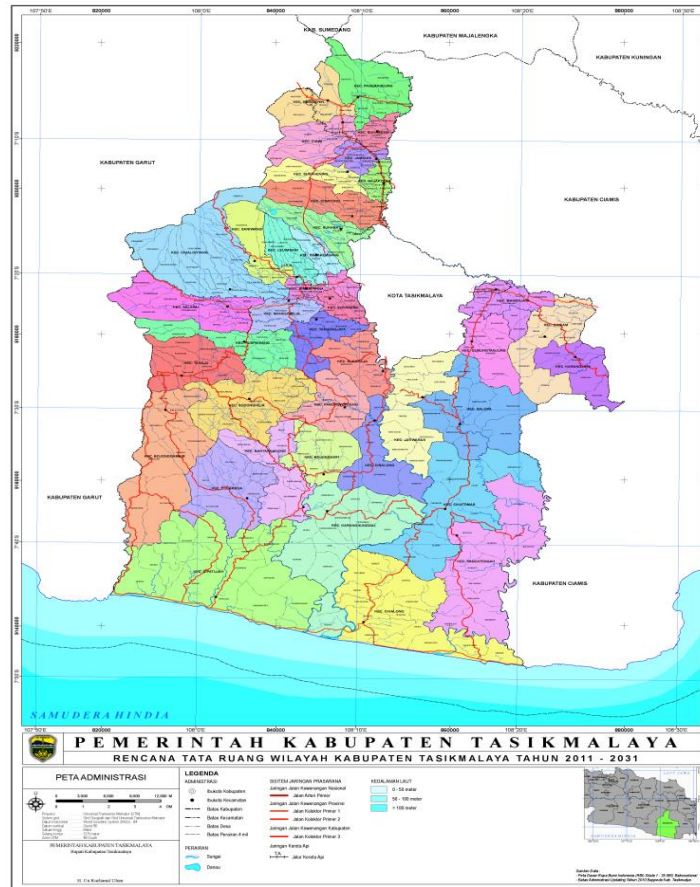
2) Luas Wilayah

memiliki wilayah seluas 2712,52 km² yang meliputi wilayah 39 Kecamatan, yaitu Kadipaten, Pagerageung, Ciawi, Sukaresik, Jamanis, Sukahening, Rajapolah, Cisayong, Cigalontang, Sariwangi, Leuwisari, Padakembang, Sukaratu, Singaparna, Salawu, Mangunreja, Sukarame, Manonjaya, Cineam, Taraju, Puspahiang, Tanjungjaya, Sukaraja, Gunungtanjung, Karangjaya, Bojunggambir, Sodonghilir, Parungponteng, Jatiwaras, Salopa, Culamega, Bantarkalong, Bojongasih, Cibalong, Cikatomas, Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong dan Pancatengah.

Tabel 1.2 : LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Cipatujah	246,67	21	Karangjaya	47,90
2	Karangnunggal	136,33	22	Manonjaya	39,41
3	Cikalong	139,66	23	Gunungtanjung	36,31
4	Pancatengah	201,85	24	Singaparna	24,82
5	Cikatomas	132,33	25	Sukarame	29,64
6	Cibalong	58,58	26	Mangunreja	19,92
7	Parungponteng	47,27	27	Cigalontang	119,74
8	Bantarkalong	59,83	28	Lewisari	53,24
9	Bojongasih	38,58	29	Sariwangi	49,66
10	Culamega	68,32	30	Padakembang	37,70
11	Bojunggambir	169,29	31	Sukaratu	57,14
12	Sodonghilir	93,11	32	Cisayong	59,40
13	Taraju	55,85	33	Sukahening	28,42
14	Salawu	50,49	34	Rajapolah	21,45
15	Puspahiang	34,89	35	Jamanis	21,28
16	Tanjungjaya	36,69	36	Ciawi	45,31
17	Sukaraja	43,08	37	Kadipaten	45,79
18	Salopa	121,76	38	Pagerageung	66,74
19	Jatiwaras	73,37	39	Suakaresik	17,18
20	Cineam	78,79			
Jumlah :		2.712,52 km²			

Gambar 1.2 : Peta Kabupaten Tasikmalaya



B. VISI DAN MISI

VISI:

Dengan sistem peradilan satu atap (one roof system) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tasikmalaya mempunyai Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

MISI:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

C. RENSTRA (RENCANA STRATEGI)

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berada dalam wilayah hukum pengadilan Tinggi Jawa Barat menggunakan sejumlah kebijakan dalam menjalankan fungsinya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang timbul dan demi kelancaran tugas. Selain itu, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah merumuskan Rencana Strategis ke depan yang dibagi ke dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenaga Kerjaan, mencakup:
 - a. Usul penambahan jumlah tenaga teknis Kepaniteraan dan tenaga Kesekretariatan.
 - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana, prasarana dan teknologi informasi mencakup :
 - a. Usul pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata difokuskan peningkatan media informasi elektronik dengan berbasis teknologi informasi dalam pelayanan kepada publik.
 - b. Peningkatan media informasi elektronik dengan berbasis teknologi informasi dalam pelayanan kepada publik.
 - c. Pengembangan perpustakaan melalui kumpulan buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - d. Usul peningkatan jumlah anggaran melalui RKAKL dan RKBMN sesuai dengan rencana kebutuhan fisik dan peningkatan media informasi elektronik dengan berbasis teknologi informasi dalam pelayanan kepada publik Pengadilan Negeri Tasikmalaya .
3. Ketatalaksanaan, mencakup :
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
 - c. Peningkatan pencapaian akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi lebih baik.
4. Hukum Materil, mencakup :
 - a. Penelaahan dan Pembendahraan materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya pencari keadilan.

BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebanyak **721** perkara dari perkara pidana maupun perkara perdata dan perkara lalulintas **29.073** sebanyak dengan matrik keadaan perkara sebagai berikut :

1. Keadaan Perkara Perdata

Keadaan perkara perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2020 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 20, perkara masuk sejumlah 252, perkara putus sejumlah 242, dan sisa akhir pada tahun 2020 sejumlah 30 perkara.

**Tabel 2.1 : Keadaan Perkara Perdata
Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020**

No	Nama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Putus	Siasa Perkara	Keterangan *
I	Perkara Perdata					
1	Gugatan	12	52	42	22	
2	Gugatan Sederhana	2	63	61	4	
3	Permohonan	2	135	132	3	
4	Perlawanan (Denden Verzet)	4	2	5	1	
	Jumlah		252	242	30	
	Upaya hukum Perkara Perdata					
	Banding	15	15	26	4	
	kasasi	19	11	11	19	
	Peninjauan Kembali (PK)	1	2	-	3	

2. Keadaan Perkara Pidana

Keadaan perkara pidana Pengadilan Negeri Tasikmalaya IA dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2020 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 67, perkara masuk sejumlah 469, perkara putus sejumlah 471, dan sisa akhir pada tahun 2020 sejumlah 65 perkara.

**Tabel 2.2 : Keadaan Perkara Pidana
Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020**

No	Nama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Putus	Siasa Perkara	Keterangan *
II Perkara Pidana						
1	Biasa	63	413	409	63	
2	Anak	2	13	15	-	
3	Tipiring (cepat)	-	42	42	-	
4	Singkat	-	-	-	-	
5	Praperadilan	-	1	1	-	
Jumlah		-	469	471	63	
6	Laulintas	-	29.073	29.073	-	
Upaya Hukum Perkara Pidana						
	Banding	-	18	17	1	
	Banding Anak	-	-	-	-	
	kasasi	5	13	6	12	
	Kasasi Anak	-	-	-	-	
	Peninjauan Kembali (PK)	-	-	-	-	
	Grasi	-	-	-	-	

B. PENYELESAIAN PERKARA

Keadaan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebanyak **721** perkara dari perkara pidana maupun perkara perdata dan perkara lalulintas **29.073** sebanyak dengan matrik keadaan perkara sebagai berikut :

**Tabel 2.3 : Keadaan Perkara
Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020**

1. Jumlah Perkara Yang diputus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Rerata Waktu Memutus (Dalam Bulan)							
		1	2	3	4	5	6	6-12	>12
1	Perdata Gugatan	12	7	6	6	1	-	-	-
2	Gugatan Sederhana	49	10	1	-	-	-	-	-
3	Perdata Permohonan	133	-	-	-	-	-	-	-
4	Perlawanan (Denden Verzet)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pidana Biasa	300	60	5	-	-	-	-	-

6	Pidana Anak	9	4	-	-	-	-	-	-
7	Tipiring (cepat)	42	-	-	-	-	-	-	-
8	Singkat	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Praperadilan	1	-	-	-	-	-	-	-

Nb: Perhitungan sesuai dengan aplikasi SIPP

2. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Tabel 2.4 : Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Perkara Perdata

Upaya Hukum Perkara Perdata						
No	Dari Jumlah Perkara Gugatan Sebanyak 54 Perkara Yang Masuk Pada Tahun 2020					
		Sisa 2019	Masuk	Putus	Sisa 2020	Keterangan
1	Banding	15	15	26	4	
2	kasasi	19	11	11	19	
3	Peninjauan Kembali (PK)	1	2	-	3	
Jumlah			35	38		

Tabel 2.5 : Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Perkara Pidana

Upaya Hukum Perkara Pidana						
No	Dari Jumlah Perkara Biasa dan Anak Sebanyak 434 Perkara Yang Masuk Pada Tahun 2020					
		Sisa 2019	Masuk	Putus	Sisa 2020	Keterangan
1	Banding	-	18	17	1	
2	Banding Anak	-	-	-	-	
3	kasasi	5	13	6	12	
4	Kasasi Anak	-	-	-	-	
5	Peninjauan Kembali (PK)	-	-	-	-	
6	Grasi	-	-	-	-	
Jumlah			31	23		

3. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Tabel 2.6 : Jumlah Perkara yang Berhasil Dimediasi

No	Wilayah Pengadilan	Jumlah Perkara	Status Keberhasilan Mediasi		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan
1	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	54	1	53	1
JUMLAH		54	1	53	1

Tabel 2.7 : Keterangan Perkara Yang berhasil Mediasi

No	Nomor Perkara	Kalsifikasi Perkara	Hakim Mediator	Keterangan
1	37/Pdt.G/2020/PN Tsm	Wanprestasi	BUNGA LILY, S.H.	Berhasil Dengan Akta Perdamaian

4. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Tabel 2.8 : Keterangan Perkara Yang Berhasil Melalui Diversi

No	Wilayah Pengadilan	Jumlah perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
1	Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas 1A.	13	13	-	-	-
JUMLAH		13	13	-	-	-

Tabel 2.9 : Keterangan Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

No	Nomor Perkara	Kalsifikasi Perkara	Hakim	Keterangan
1	-	-	-	-

C. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO pengadilan)

Akreditasi penjaminan mutu merupakan program mahkamah agung dalam upaya untuk Mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*), dengan itu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor: 3007/DJU/SK/ OT01.1/9/2019 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2015 Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai “B” Dengan nomor Sertifikat **TAPM.051/QMR/ SERTIFIKAT/7/2017**. Dalam akreditasi penjaminan mutu pada periode Juli 2017 dan rencana audit surveillance pada Juli 2020, dalam jengjang waktu tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melakukan perbaikan baik dokumen, imprastruktur dan sumber daya manusia guna mencapai nilai A *Excellent*.

Pada bulan Juli 2020 Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah dilakukan Asesmen Surveillance APM oleh Tim Akreditasi dan Pada bulan Juli 2019 dari Tim Asesmen Surveillance APM Dirjen Bdanan Peradilan Umum dari hasil Asesmen tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah banyak melakukan perubahan-

perubahan baik secara fisik (inprastuktur) untuk meningkatkan pelayanan bagi para pengguna pengadilan) maupun administrasi (dokumen). Samapi dengan saat ini PN Tasikmalaya tetap melakukan perbaikan dan pembenahan guna mencapai mecapai nilai A *Excellent*.

2. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)

Berdasarkan denagan PERMA Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak Mampu Di Pengadilan, oleh karena itu setiap para penacari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan di Posbakum.

Pengadilan Negeri Tasikmalaya mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran untuk Posbakum sebesar Rp. 31.200.000.- (untuk perincian anggaran posbakum dibahas di bab selanjutnya) alokasi anggaran ini kami kelola dan berikan kepada organisasi/OBH yang melakukan kerjasama dan telah menandatangani MoU untuk bermitra dengan pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam meberikan jasa konsultasi bagi para pencari keadilan yang datang ke pengadilan berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

2. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/ permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan :

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Banjar/N agari/ Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk tahun anggaran 2020 tidak mendapatkan alokasi dan realisasi anggaran.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas Pokok Sesuai pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yakni; Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, Lingkungan Peradilan Militer dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

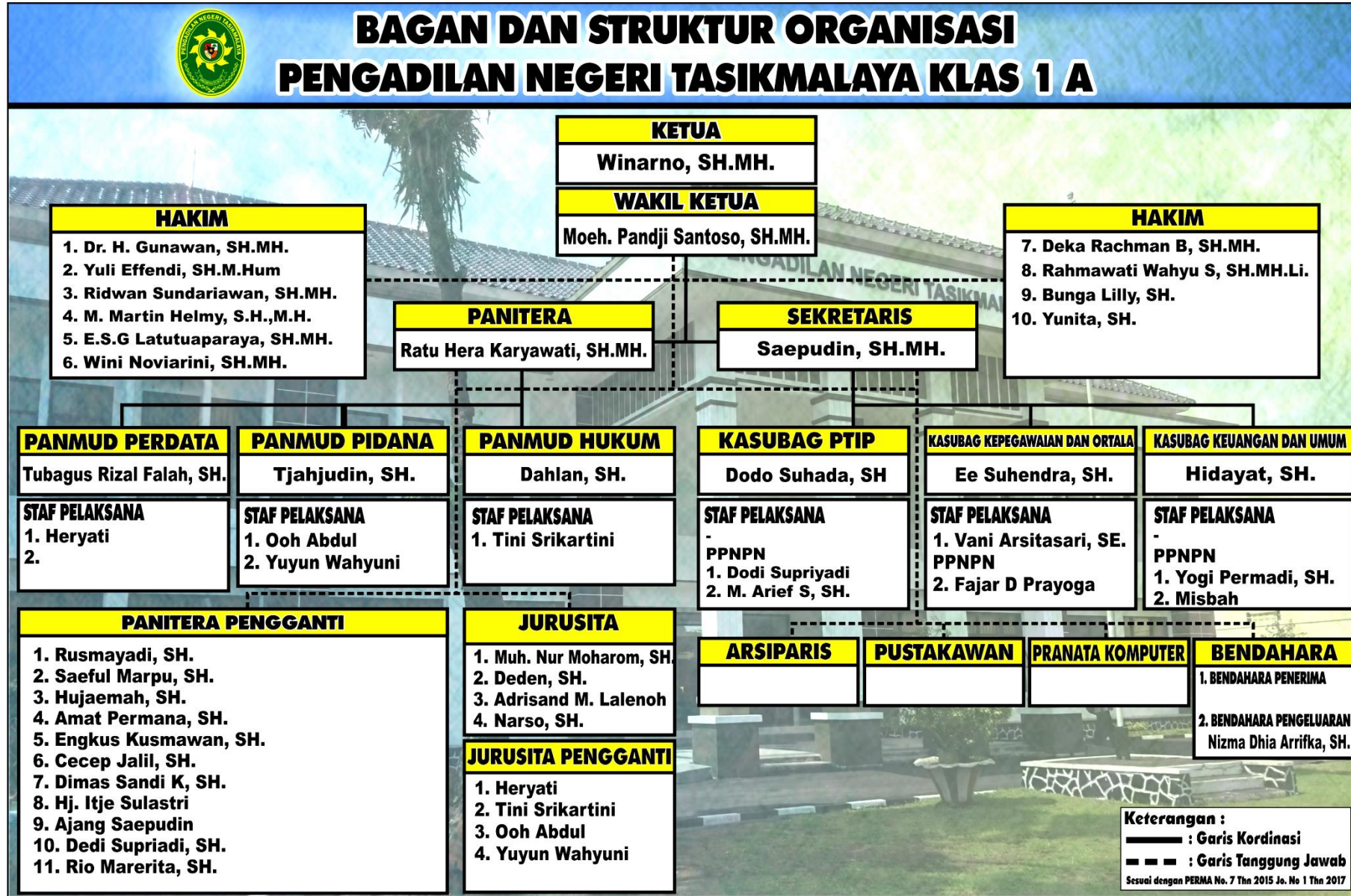
Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya (Perencanaan Impormasi Teknologi dan Pelaporan, kepegawaian, Umum dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Berdasar Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi Umum.

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020



Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dalam hal pelayanan publik dibidang penegakkan Hukum terdiri dari bidang Teknis dan Non Teknis adapun sumberdaya manusia sebagai berikut ;

Tabel 3.1 : SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

No	JABATAN	NAMA / NIP	TTL.	GOL. / TMT	TGL MEN. JABATAN	PEN. TERAKHIR	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ketua	H. Winarno, SH. MH. 196810071992121001	Tanjung Pinang 05-12-1961	IV/c 1 April 2017	19-09-2018	Magister Hukum	
2.	Wakil Ketua	Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H. 197002181996031003	Bandung, 18-23-1970	IV/c 1 April 2020	22-11-2019	Magister Hukum	
3.	Hakim	Dr. H. Gunawan,S.H.,M.H. 196107181988031002	Garut, 18-07-1961	IV/c 01-04-2013	06-08-2018	Doktoral Hukum	
4.	Hakim	Yuli Effendi, S.H.,M.Hum 196307201992121002	Surabaya, 20-07-1963	IV/c 01-04-2017	01-10-2018	Magister Hukum	
5.	Hakim	Ridwan Sundariawan, S.H.,M.H. 197111221995031003	Sukabumi, 22-11-1979	IV/b 01/10/2020	27-12-2017	Magister Hukum	
6.	Hakim	Muhammad Martin Helmy, S.H.,M.H. 197503212000121002	Bandung, 21-03-1975	IV/a 01/04/2017	09-03-2020	Magister Hukum	
7.	Hakim	E.S.G Latutuaparaya,SH.MH. 197612092001122003	Medan 09-12-1976	IV/a 01/04/2018	11-07-2016	Magister Hukum	
8.	Hakim	Wini Noviarini, SH.MH 197711282002122002	Jakarta 28-11-1977	IV/a 01/04/2019	05-08-2015	Magister Hukum	
9.	Hakim	Deka Rachman Budihanto, SH.MH. 197906152002121003	Sumenep 15-06-1979	IV/a 01/04/2019	05-09-2016	Magister Hukum	
10.	Hakim	Rahmawati Wahyu Saptaningtias, SH.MH.Li. 197708292002122003	Sleman, 29-08-1977	IV/a 01/04/2019	09-03-2020	Magister Hukum	
11.	Hakim	Bunga Lilly, S.H. 197807242002122001	Surakarta, 24-07-1978	IV/a 01/04/2019	09-03-2020	Sarjana Hukum	
12.	Hakim	Yunita, S.H. 197706202002122003	Blora, 20-06-1977	IV/a 01/04/2019	12-03-2020	Sarjana Hukum	
13.	Panitera	Ratu Hera Karyawati,S.H.,M.H. 196404261993032001	Pandeglang, 26-04-1964	IV/b 01-04-2020	01-11-2019	Magister Hukum	
14.	Panmud Perdata	Tubagus Rizal Falah, SH. 196208291989031003	Ciamis, 29-08-1962	III/d 01/10/2012	17-12-2020	Sarjana Hukum	
15.	Panmud Pidana	Tjahjudin, SH. 197212121994031003	Bandung, 12-12-1972	III/d 01/10/2012	17-12-2020	Sarjana Hukum	
16.	Panmud Hukum	Dahlan.SH. 197201191993031004	Ciamis, 19-01-1972	III/d 01/10/2016	28-02-2019	Sarjana Hukum	
17.	Panitera Pengganti	Rusmayadi, SH. 197103171993031006	Ciamis, 17-03-1971	III/d 01/10/2012	31-08-2005	Sarjana Hukum	
18.	Panitera Pengganti	Saeful Marpu, SH 197409061993031001	Tasikmalaya, 06-09-1974	III/d 01/10/2012	31-08-2005	Sarjana Hukum	
19.	Panitera Pengganti	Hj. Hujaemah, S.H. 196902151993032002	Tasikmalaya, 15-02-1969	III/d 01/10/2017	22-12-2008	Sarjana Hukum	

No	JABATAN	NAMA / NIP	TTL.	GOL. / TMT	TGL MEN. JABATAN	PEN. TERAKHIR	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Panitera Pengganti	Amat Permana, S.H. 196706091993031002	Tasikmalaya, 09-06-1967	III/d 01/10/2017	19-02-2009	Sarjana Hukum	
21.	Panitera Pengganti	Engkus Kusmawan, S.H. 197303011995031002	Tasikmalaya, 01-03-1973	III/d 10-01-2017	06-08-2019	Sarjana Hukum	
22.	Panitera Pengganti	Cecep Jalil, S.H. 198205162008051001	Tasikmalaya, 16-05-1982	III/d 01/10/2020	18-11-2015	Sarjana Hukum	
23.	Panitera Pengganti	Dimas Sandi Kresnha, S.H. 197510172008051001	Padang, 17-10-1975	III/d 01/10/2020	09-12-2016	Sarjana Hukum	
24.	Panitera Pengganti	Hj.Itje Sulastri 196112101982032004	Tasikmalaya 10-12-1961	III/c 01/04/2006	30-08-1994	SMA	
25.	Panitera Pengganti	Ajang Saepudin 196307051985021002	Garut 05-07-1963	III/c 01/04/2009	26-10-1996	SMA	
26.	Panitera Pengganti	Dedi Supriadi, S.H. 196307051985021002	Ciamis, 26-07-1980	III/c 01/04/2017	21-12-2020	Sarjana Hukum	
27.	Panitera Pengganti	Rio Marerita, SH 198603192009122004	Cilacap, 19-03-1986	III/c 01/04/2018	30-11-2015	Sarjana Hukum	
28.	Jurusita	Muhamad Nur Muharam, S.H. 198210182009041001	Sragen, 18-10-1982	III/c 01/04/2017	02-06-2020	Sarjana Hukum	
29.	Jurusita	Adrisand M. Lalenoh 196703121992031002	Bandung, 12-03-1987	III/b 01/04/2012	31-05-2010	SMA	
30.	Jurusita	Deden, SH 197406131993031003	Tasikmalaya 13-06-1974	III/b 01/04/2019	10-05-2017	Sarjana Hukum	
31.	Jurusita	Narso,SH 196712161991031003	Cilacap, 16-12-1967	III/b 01/04/2015	09-08-2019	Sarjana Hukum	
32.	Jurusita Pengganti	Heryati 196307011989032005	Ciamis, 01-07-1963	III/b 01/04/2009	17-09-1992	SMEA	
33.	Jurusita Pengganti	Tini Srikartini 196308161989032004	Garut 16-08-1963	III/b 01/04/2009	01-03-2015	SMA	
34.	Jurusita Pengganti	Ooh Abdul 197211291993031003	Tasikmalaya 29-11-1972	III/b 01/04/2013	03-07-1997	SMA	
35.	Jurusita Pengganti	Yuyun Wahyuni 196812111993032003	Tasikmalaya 11-12-1968	III/b 01/10/2009	13-09-2016	SMA	

Tabel 3.2 : SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

No	JABATAN	NAMA / NIP	TTL.	GOL. / TMT	TGL MEN. JABATAN	PEN. TERAKHIR	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekretaris	Saepudin, SH.,MH. 196408151990031002	Tasikmalaya 15-08-1964	IV/a 01-10-2018	19-07-2019	Magister Hukum	
2.	KaSub. Bag Umum dan Keuangan	Hidayat, SH 196402091987031003	Tasikmalaya 09-02-1964	III/d 01/04/2014	30-12-2015	Sarjana Hukum	
3.	KaSub. Bag PTIP	H. Dodo Suhada, SH 196806151990031003	Tasikmalaya 15-06-1968	III/d 01/10/2014	30-12-2015	Sarjana Hukum	
4.	KaSub. Bag Kepegawaian dan Ortala	Ee Suhendra, SH 198309112001121004	Tasikmalaya 11-09-1983	III/c 01/10/2020	06-09-2019	Sarjana Hukum	

No	JABATAN	NAMA / NIP	TTL.	GOL. / TMT	TGL MEN. JABATAN	PEN. TERAKHIR	KET
5.	Bendahara	Nizma Dhiya Arrifka, SH 198702042011012015	Maumere, 04-02-1987	III/c 01/04/2019	10-06-2020	Sarjana Hukum	
6.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Vani Arsitasari, SE 198903062019032005	Bandung 03-06-1989	III/a 01-03-2019	02-03-2020	Sarjana Ekonomi	

Tabel 3.3 : Sumber Daya Manusia Pegawai Kontrak (PPNPN PN Tasikmalaya) Anggaran 2020

No	Jabatan	N a m a	Ttl	Pen terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pegawai Kontrak	Misbah	Tasikmalaya, 10-03-1977	SMA	Pramubakti
2		Praptono Hadi	Bandung, 05-08-1967	SMA	Pramubakti
3		Teguh Hartono	Seragen, 10-08-1979	SMA	Satpam
4		Dodi Supriyadi	Tasikmalaya, 20-10-1985	Sarjana	Pramubakti diperbantukan di subbag PTIP
5		Fajar Destra Prayoga	Bandung, 18-11-1989	SMA	Pramubakti diperbantukan di subbag Kepegawaian
6		Heru Heryadi	Tasikmalaya, 12-05-1980	SMA	Pengemudi
7		Yogi Permadi, SH	Tasikmalaya, 20-01-1990	Sarjana Hukum	Pramubakti diperbantukan di subbag Umum dan Keuangan
8		Feri Juansyah Putra	Medan, 14-06-1987	SMA	Satpam
9		Iman	Tasikmalaya	SMA	Satpam
10		M. Arief Sanjaya, SH.	Palu, 06-06-1998	Sarjana Hukum	Pramubakri diperbantukan di bagian PTSP

1. Mutasi

Mutasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama Januari sampai dengan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4 : Mutasi Masuk
Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020**

No	N a m a	Mutasi Masuk	Keterangan
1.	Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.	dari PN Pagar Alam	Hakim
2.	Bunga Lilly, S.H.	dari PN Wonogiri	Hakim
3.	Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.Li.	dari PN Temanggung	Hakim
4.	Yunita, S.H.	dari PN Blora	Hakim
5.	Muhamad Nur Muharam, S.H.	dari PN Serang	Jurusita
6.	Tjahjudin, S.H.	dari PN Bale Bandung	Panmud Pidana
7.	Dedi Supriadi, S.H.	Dari PN Sintang	Panitera Pengganti

**Tabel 3.5 : Mutasi Keluar
Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020**

No	N a m a	Mutasi Keluar	Keterangan
1.	Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H.	Pindah Ke PN Kepahiang	Wakil Ketua
2.	Arum Widiastuti, S.H.	Pindah Ke PN Sumber	Panitera Pengganti
3.	I Made Bagiarta, S.H.,M.H.	Pindah Ke PN Bantaeng	Wakil Ketua
4.	Dwi Parawirawan, S.H.,M.H.	Pindah ke PN Bale Bandung	Panmud Hukum
5.	Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H.	Pindah ke PN Mataram	Hakim
6.	Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.	Pindah ke PT Palu	Hakim Tinggi

2. Promosi

Promosi yang terjadi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama Januari sampai dengan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6 : Promosi
Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020**

No	N a m a	Promosi	Keterangan
1	Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	Hakim Tinggi PT Palu

2	Tubagus Rizal Palah, S.H.	Panmud Perdata	Panmud Perdata PN Tasikmalaya
---	---------------------------	----------------	-------------------------------

Tabel 3.7 : Promosi Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020

No	Nama	TMT PNS	Keterangan
1	Vani Arsitasari, S.E.	2 Juni 2020	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur

3. Pensiun

Pensiun yang terjadi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama Januari sampai dengan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Pensiun Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020

No	Nama	TMT Pensiun	Keterangan
1.	Sartono	1 Januari 2020	Jurusita Pengganti
2.	Motur Panjaitan, S.H.	1 Agustus 2020	Hakim
3.	Yeni Nurjanah	12 November 2020 (Meninggal Dunia)	Panitera Pengganti

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang telah mengikuti diklat)

Diklat (Sdm Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat) yang terjadi di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tasikmalaya selama Januari sampai dengan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 : Rekap Data Pegawai Mengikuti Diklat/Pelatihan Pengadilan Negeri Tasikmalaya

No	Nama	Diklat/Pelatihan	Keterangan
1.	M. Pandji Santoso, S.H.,M.H.	Diklat SPPA	Wakil Ketua
2.	Deka Rachman Budihanto, S.H.,M.H.	Diklat SPPA	Hakim
3.	Bunga Lilly, S.H.	Pelatihan Online TOEFL	Hakim
4.	Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H.	Pelatihan HKI	Hakim
5.	Wini Noviarini, S.H.,M.H.	Pelatihan Teknis Perkara Terorisme dan Pelatihan HKI	Hakim
6.	Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H.	Pelatihan Narkotika	Hakim
7.	Ee Suhendra, S.H.	Bimtek Kepegawaian	Kasubbag Kepegawaian
8.	Hidayat, S.H.	Bimtek Umum dan Keuangan	Kasubbag Umum dan Keuangan
9.	H. Dodo Suhada, S.H.	Bimtek PTIP	Kasubbag PTIP
10.	Vani Arsitasari, S.E.	Pelatihan Online TOEFL, Bimtek Umum dan Keuangan (diperbantukan)	Analisis SDM Aparatur

11.	Dodi Supriyadi, S.Pd.	Bimtek Perencanaan	PPNPN
12.	Yogi Permadi, S.H.	Bimtek Umum dan Keuangan Aplikasi SAKTI	PPNPN
13.	Fajar Destra Prayoga	Bimtek Kepegawaian	PPNPN

5. Kebutuhan Pegawai

Dalam rangka memenuhi pencapaian dan target yang telah ditetapkan maka kebutuhan pegawai pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10 : Kebutuhan Pegawai
Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tahun 2020**

No	Data Kebutuhan	Pegawai Yang Ada	Kekurangan	Keterangan
1.	Kepaniteraan Hukum	1 orang panmud 2 orang PP 1 orang JSP	2 Orang	Pelaksana yang ada merangkap sebagai PP dan JSP
2.	Kepaniteraan Perdata	1 orang panmud 2 orang PP 1 orang JSP	2 Orang	Pelaksana yang ada merangkap sebagai PP dan JSP
3.	Kepaniteraan Pidana	1 orang panmud 4 orang PP 1 orang JSP	3 Orang	Pelaksana yang ada merangkap sebagai PP dan JSP
4.	Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	1 orang Kasub 1 orang Pelaksana fungsional kepegawaian dan 1 orang PPNPN	1 Orang	Untuk saat ini hanya dibantu oleh 1 orang PPNPN
4.	Sub Bag Umum dan Keuangan	1 orang Kasub 1 orang Bendahara 2 orang PPNPN	4 Orang	Untuk saat ini masing-masing pegawai merangkap jabatan
5.	Sub Bag PTIP	1 orang Kasub 2 orang PPNPN	2 Orang	Untuk saat ini hanya dibantu oleh 2 orang PPNPN

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dikelola semaksimal mungkin guna mencapai target dan pengelolaan keuangan yang sangat baik dan transparan terorganisir secara cepat dan tepat, Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi perencanaan tahun anggaran berikutnya.

Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satan kerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yaitu DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum. Tahun Anggaran 2020 alokasi untuk masing-masing DIPA adalah:

1. DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar Rp. 11.589.571.000 (*sebelas 20emeli lima ratus delapan Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)
2. DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 133.550.000 (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)

Pelaksanaan DIPA tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. DIPA 005.01 (*Badan Urusan Administrasi*)

yaitu sebesar Rp. 11.589.571.000 (*sebelas miliar lima ratus delapan Sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

• **Tabel 4.1 : Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja :**

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 7.020.570.000
2	Belanja Barang (52)	Rp. 1.365.216.000
3	Belanja Modal (53)	Rp. 6.538.792.000

• **Tabel 4.2 : Rincian DIPA Berdasarkan Program/Kegiatan:**

No	Program/Kegiatan/Output	Jumlah
005.01.01 1066	[Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung] [Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi]	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	Rp. 14.924.578.000
	Layanan Perkantoran	
	Gaji dan Tunjangan	Rp. 7.020.570.000
	Operasional dan Pemeliharaan kantor	Rp. 1.365.216.000
005.01.02 1071	[Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung] [Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung]	
	Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	Rp. 6.538.792.000

Dalam perjalanannya, DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01:

Tabel 4.3 : Revisi Anggaran Dipa 01

No	Jenis revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1.	Revisi Dirjen Anggaran /DJA , Revisi ke 10	11 Desember 2020	Revisi Pagu Minus

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2019 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebesar 93.62 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4 : perbandingan realisasi anggaran TA 2019 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2019			TA 2020		
		Pagu	Realisasi	%.	Pagu	Realisasi	%.
1.	Belanja pegawai	6.719.450.000	6.201.418.140	92.29%	7.020.570.000	6,809,963,777	97.00%
2.	Belanja Barang	929.296.000	908.077.852	97.72%	1.365.216.000	1,346,761,427	98.65%
3.	Belanja Modal	3.940.825.000	3.729.028.657	94.63%	6.538.792.000	6,535,111,379	99.94%
Total Realisasi (%)		93,52%			98.44%		

2. DIPA 005.03 (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum)

Yaitu sebesar Rp. 133.550.000 *seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

Dalam perjalanannya, DIPA 005.03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03:

Tabel 4.5 : Revisi Anggaran Dipa 03

No	Jenis revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DJPBN	16 September 2020	Revisi Kanwil DJPB

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2019 untuk DIPA 005.03 Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah sebesar 99.61% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6 : perbandingan realisasi anggaran TA 2019 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2019			TA 2020		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Operasional	133.550.000	133.031.471	99.61%	144,267,000	136,238,080	94.43%
Total Realisasi (%)		99.61%			94.43%		

B. PENGELOLAAN Sarana Dan Prasarana

1. Sarana Dan Prasarana Gedung

a. Bangunan Kantor Permanen, Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A Tasikmalaya ;

- Letak di Jalan Siliwangi No. 18 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.
- Luas : 800 m², 2 (dua) Lantai TA 1982/1983.
- Diperluas : 250 m², 2 (dua) Lantai TA 1986/1987.
- Diperluas : 160 m², 2 (dua) Lantai TA 1993/1994.
- Jumlah : 1.210 m², 2 (dua) Lantai.

f. Di Renovasi : Tampak Depan Prototype APBN TA.2016, TA.2019.TA.2020

b. Bangunan gedung tempat ibadah Permanen

Letak di Jalan Siliwangi No. 18 Rt.06/02, Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya. Luas : 45 m² 1 (satu) lantai Swadaya Tahun .1997

c. Bangunan Gedung Pos Jaga Permanen.

Letak di Jallan Siliwangi No. 18 Rt.06.02, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya. Luas : 3 m² 2 (dua) Unit DIPA TA 2009

d. Bangunan Kantor Permanen Ex Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Letak di Jalan Pemuda No. 3 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Luas .603 m² 2 (dua) Lantai Tahun 1945.

e. Rumah Dinas Tempat Tinggal Golongan

Jumlah keseluruhan Tempat Tinggal 8 Unit sebagai berikut :

Tabel 4.7 : Rumah Dinas

No	Alama Rumah Dinas	Kondisi	Luas Bangunan	Penghuni	Sertifikat A.n
1	Jalan.Moch Hatta No.160.A. Rt.07/07. Kel.Sukamanah,Kec. Cipedes.Kota.Tasikmalaya.	RR	115 m ²	WKPN Mohammad Pandji	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI.
2.	Jalan. Ampera No.118 Rt.03/08,Kel.Panglayungan,K ec.Cipedes,Kota.Tasikmalaya.	RR	114 m ²	-	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI
3.	Jalan. Cicurug No.35 Rt.01/10, Kel, Cikalang.Kec.Tawang, Kota.Tasikmalaya.	RR	122 m ²	-	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI.
4.	Jalan.Macan I No.6 Rt.01/09,Kel.Kahuripan,Kec.T awang,Kota.Tasikmalaya.	RR	122 m ²	Hakim Wini Noviarini, SH. MH..	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI
5	Jalan. Macan II No.4 Rt.01/09,Kel.Kahuripan,Kec,T awang,Kota.Tasikmalaya.	B	122 m ²	Hakim Ridwan Sundariawan, SH.,MH.	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI
6	Jalan.Siliwangi No.18 A .belakang PN TSM. Rt.06/02, Kel. Tugujaya. Kec. Cihideung,Kota.Tasikmalaya.	B	122 m ²	-	Pemerintah RI Cq.Mahkama h Agung RI
7	Jalan Siliwangi No.18 B belakang PN TSM. Rt 06/02. Kel.Tugujaya. Kec. Cihideung, Kota.Tasikmallaya,	B	122 m ²	KPN Winarno, SH. MH	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI
8	Jalan.Siliwangi No.18 C belakang PN.TSM. Rt.06/02,Kel. Tugujaya.Kec, Cihideung, Kota.Tasikmalaya.	B	250 m ²	-	Menyatu dengan Sertifikat No. B.6383328

f. Ruang Sidang.

Ruang Sidang pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A Tasikmalaya sebanyak 3 (tiga) Ruangan, yaitu :

1. Ruang Sidang I
2. Ruang Sidang II
3. Ruang Sidang III
4. Ruang Sidang Anak

g. Ruang Kerja.

Ruang kerja Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum, Kepala Sub Umum dan Keuangan, Kepala Sub Kepegawaian dan Ortala, Kepala Sub PTIP, Panitera Pengganti, Perpustakaan, Mediasi, Arsip, Kamar Tahanan, Partry Lobby, Ruang Rapat, Ruang Jaksa, Ruang Pengacara dan lain – lain.

Tabel 4.8 : Kendaraan Dinas pada Pengadilan Tasikmalaya

No	URAIAN	Tahun Perolehan	KONDISI			Keterangan
			Baik	RR	RB	
I Jenis Kendaraan Roda 4						
1	Toyata KF 83 SUPER	2004	√			
2	Toyota E STD IDENT INNOVA	2012	√			
3	Toyota NEW Corola1.8 G MT Sedan.	2007	√			Transper masuk dari MA
4	Mitsubishi	2011	√			Pinjam Pakai PEMKOT
II Jenis Kendaraan Roda 2						
1	Honda Karisma NF 125 D	2003		√		
2	Honda GLP III 160 cc	2006		√		
3	Honda GLP III 160cc	2006		√		
4	Honda NF 100 TD REVO 100 cc	2008	√			
5	Honda NF 100 TD REVO 100 cc	2007	√			
6	Honda NF 11B1DM/T REVO 110cc	2009	√			

Tabel 4.9 : Sarana Dan Prasarana Peralatan dan Mesin

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket.
			Baik	RR	RB	
1	Ruang Ketua	1	√			
2	Ruang Wakil Ketua	1	√			
3	Ruang Hakim	1	√			
4	Ruang Panitera	1	√			
5	Ruang Sekretaris	1	√			
6	Ruang Sidang Umum	3	√			

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket.
			Baik	RR	RB	
7	Ruang Kepaniteraan	2	√			
8	Ruang Kesekretaritan	2	√			
9	Ruang Lobi (PTSP)	1	√			
10	Ruang Sidang Anak	1	√			
11	Ruang Mediasi	1	√			
12	Perpustakaan	1	√			
13	Ruang Tamu Terbuka	1	√			
Peralatan dan Mesin						
1	Stationary Water Pump	1	√			
2	Lemari Besi/Metal	15		√		
3	Lemari Kayu	22		√		
4	Rak Besi	15	√			
5	Rak Kayu	9		√		
6	Filing Cabinet Besi	15		√		
7	Brangkas	2			√	
8	Tabung Pemadam Api	3	√			
9	CCTV – Camera Control Television System	16	√			
10	White Board	2		√		
11	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1	√			
12	Mesin Absensi	1	√			
14	Meja Kerja Besi/Metal	8	√			
15	Meja Kerja Kayu	78	√			
16	Kursi Besi/Metal	147	√			
17	Kursi Kayu	61		√		
18	Sice	10		√		
19	Bangku Panjang Besi/Metal	4	√			
20	Bangku Panjang Kayu	38		√		
21	Meja Rapat	1		√		
22	Meja Komputer	10	√			
23	Meja Telepon	2		√		
24	Meja Resepsionis	1	√			
25	Pot Bunga	2		√		
26	Partisi	7	√			
27	Jam Elektronik	16	√			
28	A.C. Split	25	√			
29	Kipas Angin	7		√		
30	Televisi	3	√			
31	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1		√		
32	Sound System	3		√		
33	Megaphone	1	√			
34	Lambang Garuda Pancasila	6	√			
35	Gambar Presiden/Wakil	3	√			

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang			Ket.
			Baik	RR	RB	
	Presiden					
36	Tiang Bendera	5		√		
37	Tangga Aluminium	1			√	
38	Kaca Hias	7	√			
39	Dispenser	1	√			
40	Mimbar/Podium	1	√			
41	Lambang Instansi	1	√			
42	Asbak Tinggi	6	√			
43	Camera Digital	0	√			
44	Telephone (PABX)	1		√		
45	Pesawat Telephone	15		√		
46	Handy Talky (HT)	0	√			
47	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	0	√			
48	Digital Recording System	1	√			
49	Internet	2	√			
50	P.C Unit	40		√		
51	Lap Top	8	√			
52	Note Book	8		√		
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22		√		
54	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	√			
55	Router	2	√			
56	Modem	2	√			
57	Peralatan Jaringan Lainnya	6	√			
58	JARINGAN	1	√			
59	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	√			
60	Tangga Alumunium	2	√			
61	Tiang Bendera	1	√			
62	Mesin Potong Rumput	1	√			
63	Digital Running Teks	2	√			
64	Smat TV	2	√			

2. Pemeliharaan dan Perawatan.

Dalam setahun ini kegiatan di sub bagian Umum dan Keuangan mengkoordinir seluruh aset dan Barang Setiap Bulan, Belanja ATK setiap bulan sekali, Memperpanjang Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) maupun Roda 4 (empat), Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) maupun Roda 4 (empat), Perawatan dan pemeliharaan Gedung Kantor setiap semester atau setiap ada kerusakan, Perawatan AC dan Computer setiap 3 (tiga) bulan sekali, Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki, Perawatan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, Mengkoordinir seluruh tugas satuan pengamanan (SATPAM), Mengkoordinir petugas kebersihan (Cleaning Service), Mengkoordinir Internet, Wabsete, Mengagendakan Surat Masuk, Surat Keluar, Mengantarkan Surat dan Mengambil Surat ke Kantor POS dan GIRO, Mencatat Barang Milik Negara ke dalam Aplikasi SIMAK BMN, Pembuatan DBR dan KIB, setahun sekali, melaksanakan Rekon ke kantor KPKLN, Membuat laporan SABMN Semesteran, Tahunan, Melaksanakan Pemeliharaan, Perawatan Koleksi Buku-buku Perpustakaan setiap seminggu sekali, Melaksanakan Membuat Laporan Bulanan dan Tahunan Kegiatan Administrasi Umum, Pendataan BMN yang telah Rusak Berat dan tidak bisa di pakai lagi, untuk di usulkan Penghapusan, Melaksanakan Pelelangan BMN yang sudah ada SK Penghapusan.

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A, Pengecetan dinding Luar dan dalam gedung kantor biaya dari DIPA TA 2020.

- Perawatan Taman Halaman Gedung Kantor biaya dari DIPA TA. 2020
- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Pembayaran Pajaknya sebanyak 4 unit
- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dan Pembayaran Perpanjangan Pajak sebanyak 6 (enam) unit biaya dari DIPA TA 2020.
- Perawatan AC sebanyak 19 (sembilan belas) unit biaya dari DIPA 2020
- Perawatan Perangkat Computer (PC) sebanyak 40 (empat puluh) unit biaya dari DIPA TA.2020

C. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel, hal ini sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya :

1. Perangkat Keras

- 2 set PC Server
- 2 rak mounting
- PC Server
- Mikrotik RB 750
- Mikrotik Mikrotik Dude Edition 1U Rackmount [RB1100Ahx4]
- Smart TV LED 42in Pemberitahuan Jadwal sidang

- Media informasi dengan touchscreen dengan opraning sistem android
 - Jaringan internet lokal dan Wifi berbasis optik yang didukung oleh Komputer PC sebanyak 40 unit dan laptop sebanyak 12 unit notebook 4 unit dengan kecepatan 100 mbps 1:1
 - Mesin Edisi dari pihak BRI
 - Voice Announcer Untuk Panggilan Sidang.
 - Wifi
2. Perangkat Lunak
- Aplikasi jadwal sidang dan Media Informasi

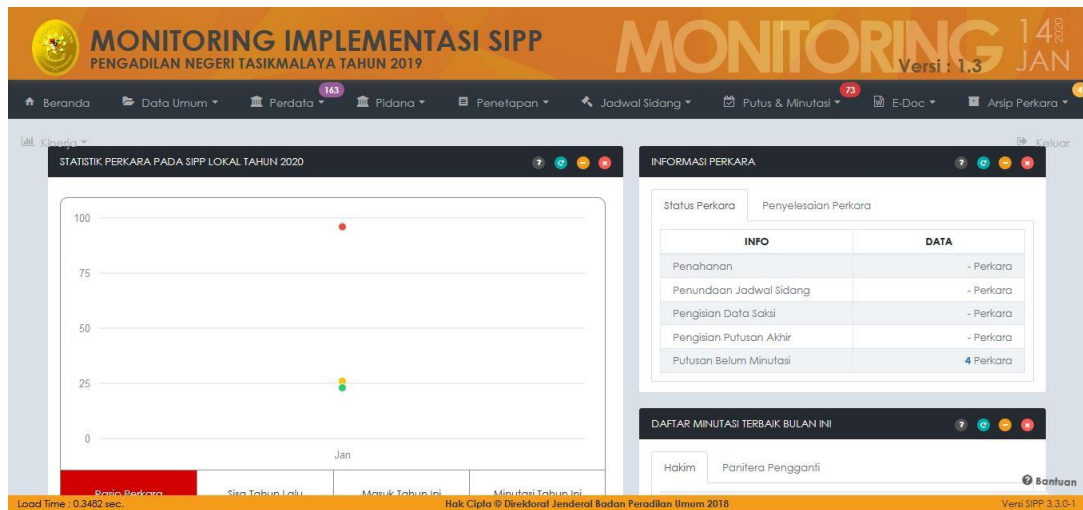


Gambar 4.1: Media Informasi

- Aplikasi Penuluruhan perkara (SIPP/CTS 3.3.0-1)

Gambar 4.2: Aplikasi SIPP

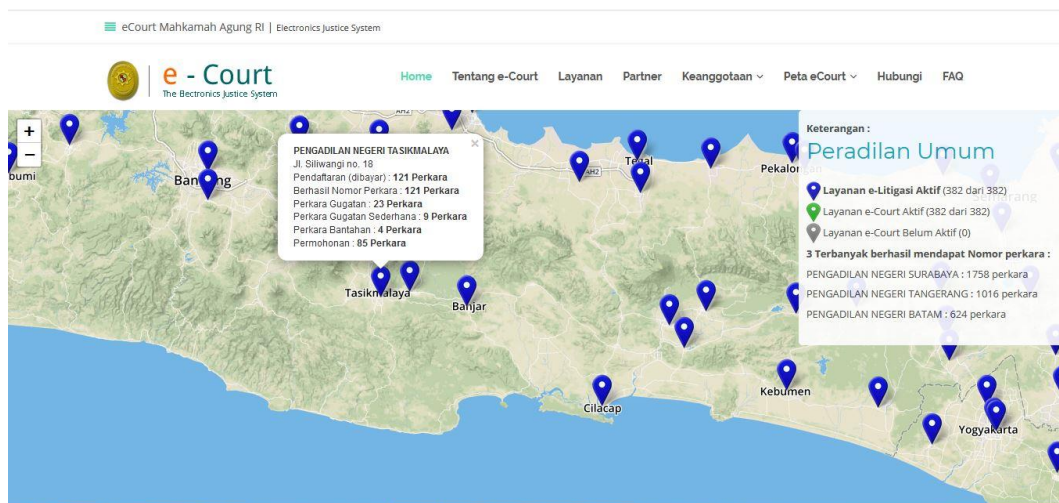
- Aplikasi Monitoring Perkara SIPP (MIS)



Gambar 4.3 : Aplikasi MIS

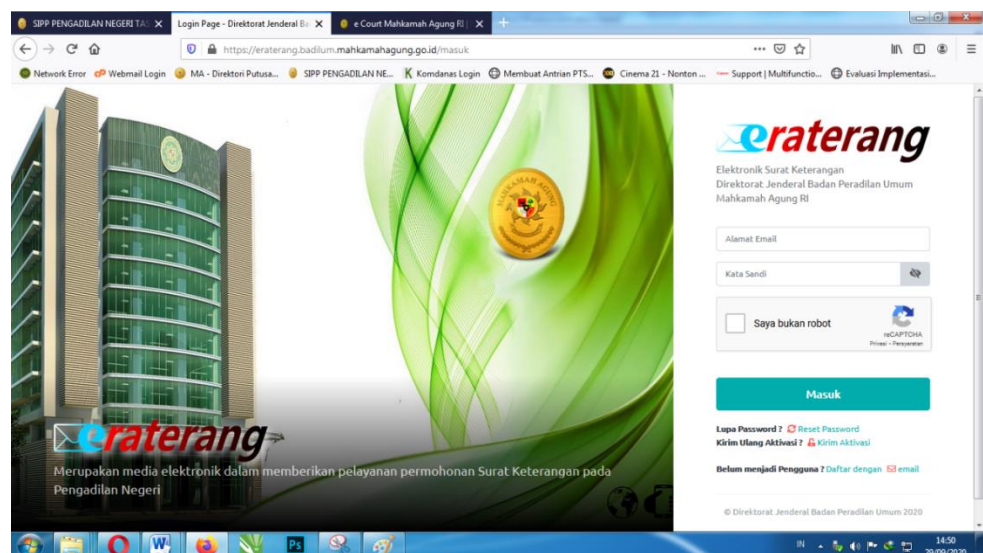
- E-Court Mahkamah Agung

Penerapan e-court pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan banyak perkara yang masuk melalui aplikasi e-court



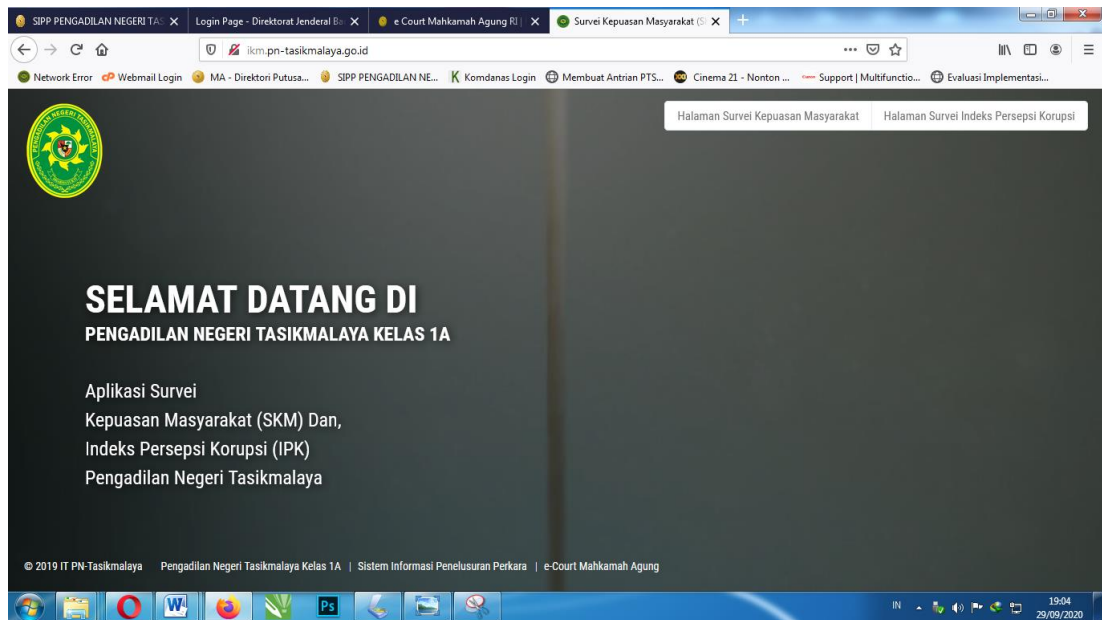
Gambar 4.4 : Peta e-Court PN Tasikmalaya

- Eraterang Mahkamah Agung



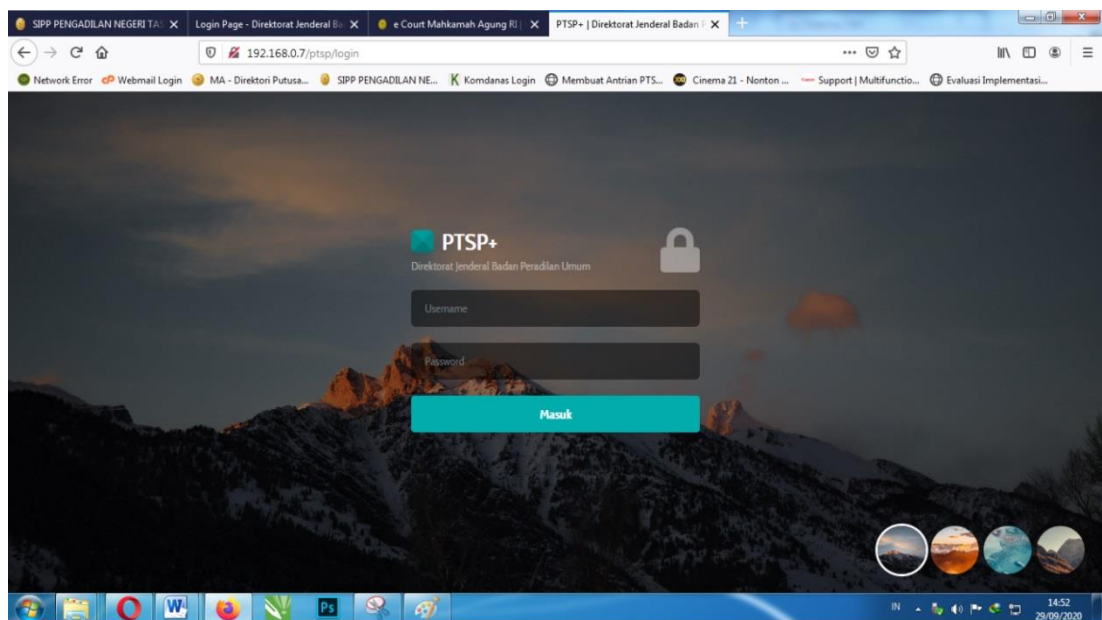
Gambar 4.5 : Eraterang Mahkamah Agung

- **Survey IKM dan IPK**



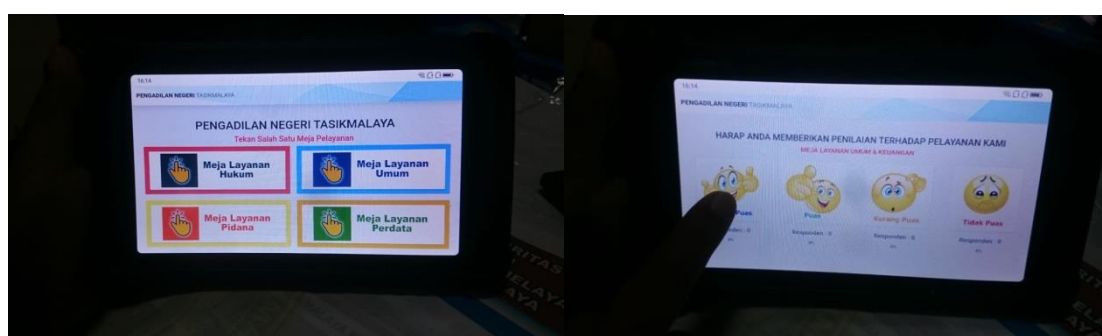
Gambar 4.6 : Survey IKM dan IPK

- **Aplikasi PTSP**



Gambar 4.7 : Aplikasi PTSP

- **Survey Pelayanan PTSP**



Gambar 4.8 : Survey Pelayanan PTSP

Aplikasi penelusuran perkara yang diintegrasikan ke dalam website Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan alamat/ url: www.pn-tasikmalaya.go.id.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif Peradilan melalui berbagai Kebijakan pembaruan untuk mewujudkan Pengadilan yang Agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan Badan Peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka Pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) Area “**Peradilan yang Agung**” yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: **Pengarah/Pengendali** (*Driver*), **Sistem dan Penggerak** (*System and Enabler*), dan **Hasil** (*Result*).

1. Sebagai Fungsi Pengarah adalah Area:

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN

2. Fungsi Sistem dan Penggerak, berada dalam Area:

2.1. **KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN;**

2.2. **SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA-PRASARANA DAN KEUANGAN;**

2.3. **PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN;**

3. Sedangkan Fungsi hasil dalam Area:

3.1. **KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN;**

3.2. **PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU;**

3.3. **KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN;**

Tujuh Area ini dikembangkan berdasarkan kerangka Pengadilan yang Agung (*Court Excellence Framework*) yang merupakan Kerangka Pikir dan Kerja Bagi Pengadilan yang ingin meningkatkan Kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara Internasional.

Dalam pelaksanaan **Fungsi Teknis**, Masalah yang dihadapi Badan-Badan Peradilan yang harus mendapat perhatian khusus, adalah:

1. Kepastian Hukum dan Kualitas serta konsistensi Putusan.

2. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di Pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.

3. Kurangnya pemahaman Pencari Keadilan dan Pengguna Pengadilan mengenai Prosedur, Dokumen dan Persyaratan yang diperlukan.

4. Minimnya kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam **Fungsi Pendukung**, antara lain:

1. Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia, Distribusi Hakim dan Aparatur Peradilan yang belum merata.
2. Dalam hal pengelolaan Sumber Daya Keuangan, antara lain adalah belum adanya *Standar Pelayanan* yang baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya perangkapan Jabatan antara Jabatan Struktural dengan Jabatan Pengelola Keuangan.
3. Dalam hal pengelolaan Sarana dan Prasarana, antara lain:
 - 3.1. Lokasi Pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh Masyarakat yang berasal dari daerah pinggir Kota.
 - 3.2. Gedung Pengadilan yang masih perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi Keamanan maupun Kenyamanan.
 - 3.3. Kemampuan untuk mengelola Prasarana dan Sarana Pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap Prestasi Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan Pengadilan.
 - 3.4. Akuntabilitas pengadaan Barang dan Jasa, serta Manajemen Aset Negara, yang perlu terus diupayakan perbaikannya.
 - 3.5. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik.
 - 3.6. Dalam hal pengelolaan Teknologi Informasi (TI)
 - 3.6.1. Upaya untuk mengaplikasikan Teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para Pencari Keadilan dan pengguna Pengadilan, dimana perlunya 1 (satu) Kebijakan Sistem Pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan Fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan Kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
 - 3.6.2. Transparansi Peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari Pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat Peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi Publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga Pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan Informasi.

Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Tasikmalaya dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, didukung dengan perubahan fisik maupun non-fisik serta ditunjang dokumen dalam penegasan penjaminan mutu meliputi manual mutu, SOP, SK-SK KPN, dokumen SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM), dan dokumen pendukung lainnya. Moto yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah **SANTRI** (*Smart, Akuntabel, Netral, Transparan, Responsible, Integritas*).

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 15 Juni 2019 Dengan memperbandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan bukti-bukti implementasi/pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "B" kepada Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Sebuah pencapaian yang cukup memuaskan akan tetapi kami berupaya untuk meningkatkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Tasikmalaya supaya tercapai predikat "A excellent".



Gambar 5.1: Sertifikat APM PN Tasikmalaya

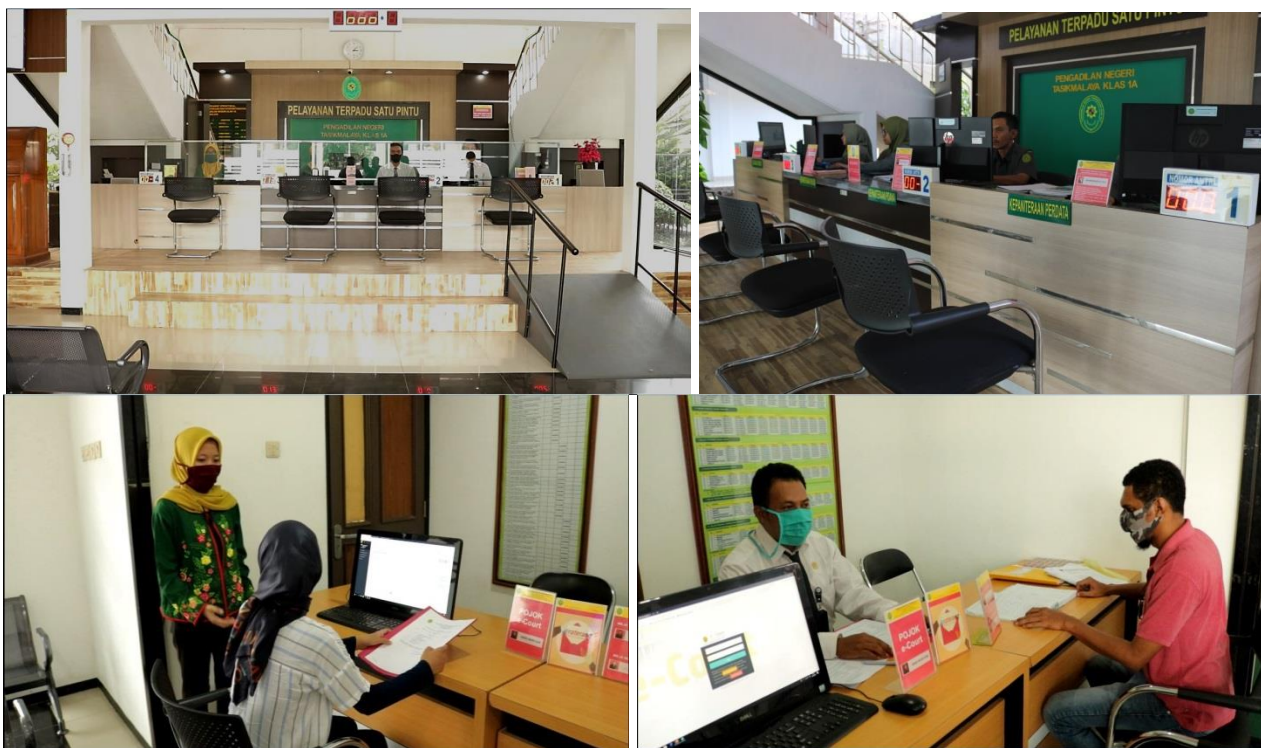
B. Pelayana Terpadu Satu Pintu

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I A, tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang telah diatur dalam Buku II, namun

semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan public. Dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan teratur serta dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima di Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas I A.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjenbadilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3 /2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri maka ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA Nomor W11.U9/165 /KP.11.01/12/2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA.

Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas didukung dengan aplikasi PTSP+ v2.2-2 dan antrian pelayanan berbasis elektronik, guna memudahkan para petugas PTSP dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan.

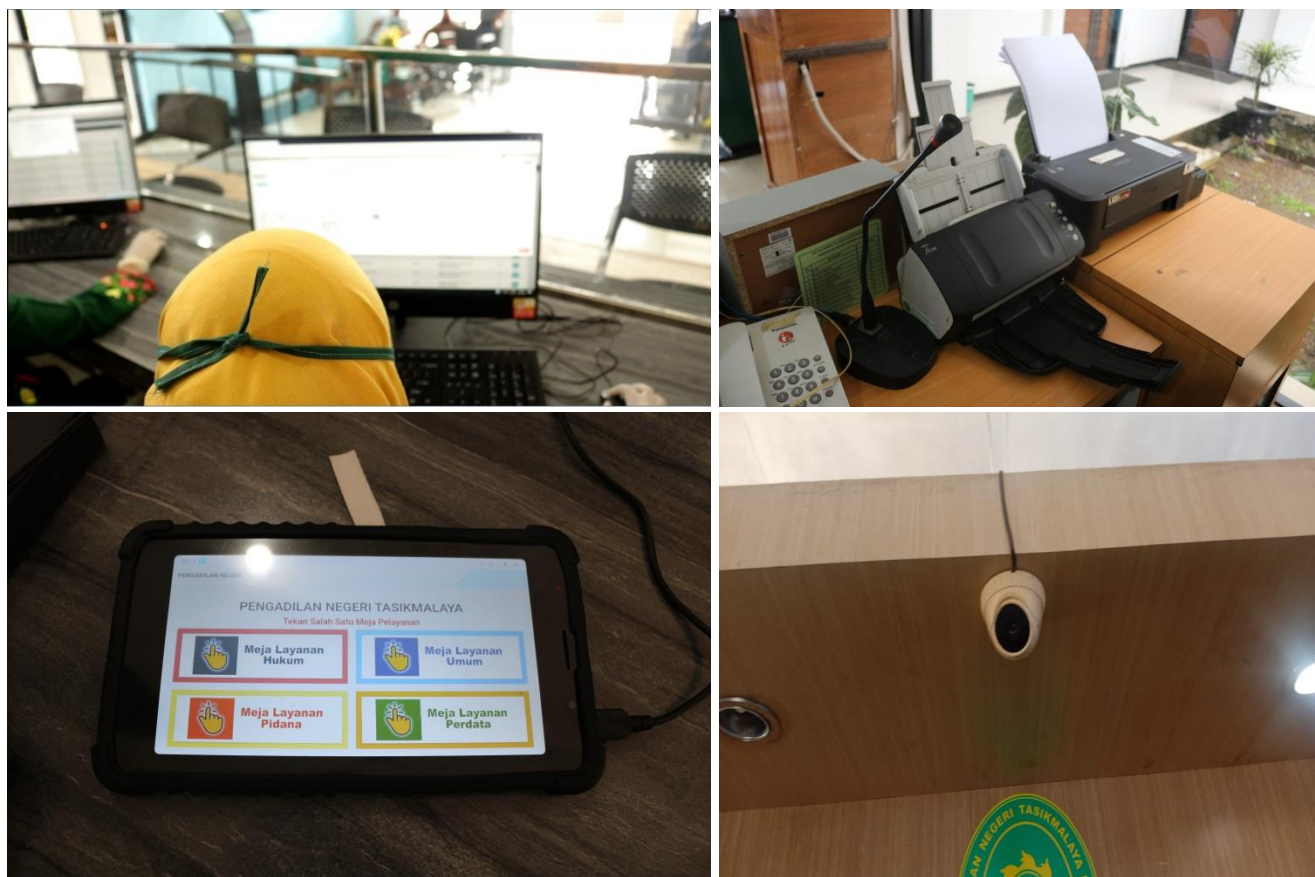


Gambar 5.2 : PTSP, Pojok e-COUTR dan Meja Inzage PN Tasikmalaya

Komputer dan Pelalatan Pendukung Lainnya Peralatan Komputer dan Pendukung lainnya yang ada di meja PTSP:

1. 5 Unit PC beserta jaringan internet dan localhost
2. 1 Unit Printer
3. 1 Unit Scanner

4. 2 Buah Tablet untuk Survey Kepuasan Pengguna
5. 1 Set alat pengeras Suara (Sound sistem)
6. 1 Unit Telepon
7. 1 Unit CCTV



Gambar 5.3 : Meja PTSP dan Pelalatan Pendudkng Lainnya

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi merupakan inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi oleh karena itu Pengadilan Negeri Tasikmalaya terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik diantaranya inovasi yang telah dilakukan guna mempermudah dalam pelayanan sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : W11.U9/49/KP.11.01/1/2020 tentang Penetapan daftar produk inovasi aplikasi dan layanan masyarakat pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya :

1. Mesin Antrian PTSP.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-IKM) berbasis website.
3. Indeks Persepsi Korupsi Elektronik (e-IPK) berbasis website.
4. Ruang Tamu Terbuka.
5. Ruang Pengguna PTSP.
6. Meja e-Court / Pojok e-Court.
7. Banner Elektronik (e-Banner).
8. Meja Informasi.
9. Indeks Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-IKM) berbasis android

10. Indeks Persepsi Korupsi Elektronik (e-IPK) berbasis android
11. Indeks Kepuasan Masyarakat Elektronik PTSP (e-IKM PTSP).
12. Meja Inzage.
13. Video Layanan dan Informasi Hukum.
14. Data Informasi Kepegawaian Elektronik (e-Kepegawaian)

Disajikan dalam lampiran

BAB VI PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Salah satu unsur manajemen yang sangat penting adalah pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan agar apa yang telah di direncanakan dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan tersebut dapat dicapai.

Berdasarkan ketentuan seperti yang termaktub dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan.

Untuk mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang administrasi pengawasan. Untuk melakukan pengawasan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya menunjuk dan menugaskan Hakim sebagai pengawas bidang dan Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawasan bidang tersebut, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tasikmalaya Nomor : W11.U9/49/KP.11.01/7/2019, tanggal 29 Agustus 2018, tentang penunjukkan Hakim Pegawai Bidang pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tasikmalaya.

Adapun matrik susunan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1 : Susunan Hakim Pengawas Bidang
Pengadilan Negeri Tasikmalaya**

NO	NAMA	JABATAN	HAKIM PENGAWAS BIDANG	KET
1	<u>Moeh. Pandji Santoso, S.H.,M.H.</u> 197002181996031003	Wakil Ketua	Kordinator Hakim Pengawas Bidang	
2	<u>Y Wisnu Wicaksono, SH.MH.</u> 196012311988031031	Hakim Madya Utama	Kepaniteraan Perdata	
3	<u>Dr. H. Gunawan,S.H.,M.H.</u> 196107181988031003	Hakim Madya Utama	Kepaniteraan Hukum dan Arsip	
4	<u>Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.</u> 1963307201992121001	Hakim Madya Utama	Sub Bag Umum dan Keuangan	
	<u>Wini Noviarini, SH.MH</u> 197711282002122002	Hakim Madya Pratama		
5	<u>Ridwan Sundariawan,SH.,MH.</u> 196012311988031031	Hakim Madya Pratama	Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	

6	<u>Muh. Martin Helmy, S.H.,M.H.</u> 197503212000121002	Hakim Madya Pratama	Kepaniteraan Pidana	
7	<u>E.S.G Latutuaparaya, SH.MH</u> 197612092001122003	Hakim Madya Pratama	Kimwasmat	
8	<u>Rahmawati Wahyu S, SH.MH.Li.</u> 197708292002122003	Hakim Madya Pratama	SIPP dan MIS	
9	<u>Bunga Lilly, S.H.</u> 197807242002122001	Hakim Madya Pratama	PTSP	
10	<u>Yunita, S.H.</u> 197706202002122003	Hakim Madya Pratama	Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	

b. Kepaniteraan

1. Panitera : Ratu Hera Karyawati, SH.,MH.
2. Panmud Perdata : Tubagus Rizal Falah, SH.
3. Panmud Pidana : Tjahjudin, SH.
4. Panmud Hukum : Dahlan, SH.

c. Kesekretariatan

1. Sekertaris : Saepudin, SH.,MH.
2. Kasub Bag Umum dan Kepegawaian : Hidayat, SH
3. Kasub Bag PTIP : Dodo Suhada, SH.
4. Kasub Bag Kepegawaian dan ORTALA : Ee Suhendra, SH.

d. Kehumasan : Deka Rachman B,SH.,MH.

Hasil dari pengawasan dari masing-masing bidang tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya selaku koordinator Pengawas Bidang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya . Berdasarkan hasil pengawasan tersebut selanjutnya akan diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan juga sangat penting dalam pengambilan kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Koordinasi dan para Hakim Pengawas Bidang tahun 2020 (Januari s/d Desember), kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi

- a. Melaksanakan pembinaan bersama ketua kepada para hakim dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bidang yudisial, administrasi perkara dan administrasi umum perkantoran (manajemen) dilakukan secara rutin 2 (dua) minggu sekali, pula menyelenggarakan panel diskusi di lingkungan para hakim mengenai hukum materiil dan formil;
- b. Memberikan petunjuk-petunjuk teknis pengawasan kepada para hakim pengawas bidang
- c. Menerima pelaporan dari para hakim pengawas bidang mengenai temuan-temuan baik secara lisan maupun tertulis dan menindak lanjuti temuan-temuan dengan memberikan petunjuk-petunjuk perbaikannya.

- d. Pengawasan menyeluruh terhadap para hakim, panitera sekretaris dan jajarannya baik di bidang yudisial maupun administrasi umum.

2. Bidang Kepaniteraan Perdata

- a. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara antara lain :
 - Surat gugatan atau surat permohonan
 - Meneliti minutasi berkas perkara
 - Memeriksa pembundelan berkas perkara gugatan dan permohonan;
 - Meneliti perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum (Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjaun Kembali).
 - Memeriksa dan mengawasi penginputan proses perka di aplikasi CTS/SIPP.
 - Memeriksa pengisian-pengisian buku register perkara dan aplikasi Sistem Inpormasi penulusuran Perkara (SIPP) menurut kolom-kolom peruntukannya baik register perkara gugatan maupun permohonan;
- b. Mengamati kinerja kepaniteraan, panitera pengganti dan jurusita pengganti dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- c. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada koordinator mengenai temuannya dari Januari s/d Desember 2019, dilakukan setiap bulan sekali laporan secara tertulis pada setiap kali menjelang rapat koordinasi yang diselenggarakan sebulan sekali.
- d. Pengawasan bidang keuangan perkara, terus mengontrol perkara-perkara yang diterima dan diputus, perkara prodeo, jurnal penggunaan biaya perkara, sampai perkara diselesaikan oleh pengadilan;

3. Bidang Kepaniteraan Pidana

- a. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara antara lain :
 - Meneliti Berkas Perkara Pidana yang dikirimkan dari kejaksaan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
 - Meneliti minutasi berkas perkara
 - Memeriksa pembundelan berkas perkara pidana;
 - Meneliti perkara-perkara yang dimintakan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjaun Kembali, maupun Grasi).
 - Memeriksa dan mengawasi penginputan proses perka di aplikasi CTS/SIPP.
 - Memeriksa pengisian-pengisian buku register perkara dan aplikasi Sistem Inpormasi penulusuran Perkara (SIPP) menurut kolom-kolom peruntukannya baik register perkara gugatan maupun permohonan;
- b. Mengamati kinerja kepaniteraan, panitera pengganti dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- c. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada koordinator mengenai temuannya dari Januari s/d Desember 2019, dilakukan setiap bulan sekali laporan secara tertulis pada setiap kali menjelang rapat koordinasi yang diselenggarakan sebulan sekali.

4. Bidang Kepaniteraan Hukum

- Pengawasan dibidang kearsipan dan pelaporan sepanjang tahun 2019 telah melaksanakan tugas mengawasi pengarsipan berkas perkara yang telah diselesaikan dan pengarsipannya, kemudian melaporkannya kepada Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan.
- Pengawasan ketrebukaan informasi sepanjang tahun 2019 yang meliputi permintaan informasi secara langsung maupun secara tidak langsung.

5. Bidang Umum dan Keuangan

Bagian Umum

- Memeriksa dan meneliti administrasi surat masuk dan keluar
- Memeriksa kebersihan dan kerapian lingkungan kantor PN Tasikmalaya
- Memeriksa pengelolaan Perpustakaan
- Memeriksa pesedian perlengkapan kantor
- Memeriksa pengelolaan SIMAKBMN dan data DIR disetiap ruangan

Bagian Keuangan

- Pengawasan penyerapan dipa 01 dan dipa 03 serta pengalokasiannya

6. Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana

- Memeriksa dan meneliti kelengkapan buku induk dan File pegawai.
- Pengawasan Pengelolaan Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan SKP.
- Memeriksa Pengelolaan daftar urut kepangkatan (DUK)
- Memeriksa pengelolaan kenaikan pangkat hakim dan pegawai
- Memeriksa pengelolaan absensi hakim dan pegawai

7. Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

- Pengawasan Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa)
- Pengawasan pengelolaan dan pengisian SIPP/CTS
- Pengawasan Peliputan Dan Penginputan Content Website
- Pengawasan dalam pembuatan laporan kegiatan tahun 2019, SAKIP dan Renstra

B. EVALUASI

Evaluasi adalah sebagai proses pengukuran akan eektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka dari itu elvaluasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menindak lanjuti hasil pengawasan dari hakim pengawas bidang guna meminimalisir ketidak sesuaian yang diakibatkan kelalaian atau pun *human error*.

Evaluasi dilakukan dari hasil pengawasan dari setiap bidang dan ditindak lanjuti agar kesalahan atau pun temuan yang minor tidak berkelanjutan terjadi, kegiatan evaluasi ini dilakukan dan dilaksanakan minimal 1 bulan sekali dalam rapat bulanan.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang cukup tinggi dan juga peningkatan disiplin kerja sehingga dengan adanya upaya peningkatan kinerja tersebut maka prestasi kerja dapat dicapai secara maksimal.

B. Rekomendasi

1. Dalam penerapan renstra yang sudah genap 5 (lima) tahun maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam pembuatan renstra 5 (lima) tahun kedepan akan memfokuskan kepada pengembangan teknologi informasi disegala bidang guna membangun pengadilan yang moderen.
2. Pengadilan Negeri Tasikmalaya masih banyak kekurangan pegawai (SDM) dikarena intensitas perkara yang ditangani cukup tinggi serta banyak pegawai yang merangkap pekerjaan.
3. Kenaikan Klas pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dari I B ke I A tidak ditunjang dengan anggaran dipa selayaknya anggaran untuk .
4. Kekurangan sarana prasarana dan penunjang teknologi informasi yang memadai antara lain :
 - Penunjang kendaraan untuk operasional kantor dikarenakan kendaraan yang ada sudah telalu lama dibutuhkan untuk peremajaan.
 - Peralatan dan mesin dalam meningkatkan kinerja banyak hambatan yang sering timbul dikarenakan kekurangan peralatan dan mesin.
 - Penunjang Teknologi Informasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi

publik dan pelayanan satu pintu.

Melalui laporan kegiatan tahun 2020 ini kami mengusulkan bahwa kekurangan kurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pekerjaan di kantor Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.

Demikian laporan kegiatan tahun 2020 ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Tasikmalaya, 8 Januari 2020

KETUA

PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA ,



H. WINARNO, SH.MH.
Nip. 19681007199212

